

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 246 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 35);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup; dan

f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
    a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
    b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
    c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 246

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 246 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penyesuaian atas Rencana Kerja Dinas yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan dinamika dan perubahan kebijakan, capaian kinerja, serta kondisi aktual pembangunan daerah.

Renja Perubahan ini disusun untuk mengakomodasi perubahan arah kebijakan, penyesuaian anggaran, serta penyempurnaan target dan indikator kinerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai pertengahan tahun berjalan. Renja Perubahan juga menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025 disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan

   Persiapan penyusunan renja perubahan meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (b) Orientasi mengenai Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Penyusunan rancangan awal Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

   Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Bandung dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir
   Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung menyampaikan seluruh Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung dari rancangan awal renja sampai Rancangan Akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029
2. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
3. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan awal renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bapperida Kabupaten Bandung untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan awal Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Awal Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Daerah

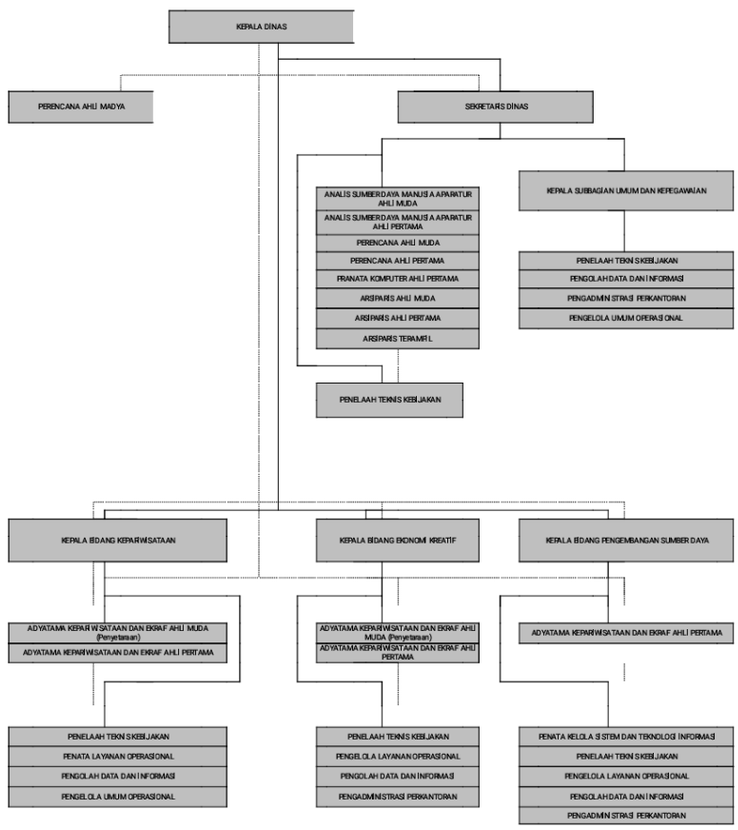
Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Berikut gambaran struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung sesuai gambar 1.1 :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Disbudpar Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071), yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat beserta perubahannya.
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
6. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia

Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan pelaksaan peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomer 4 Tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ekonomi Kreatif;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daearh Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten Bandung;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ekonomi Kreatif;
24. Peraturan Bupati Bandung Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode tahun 2025 setelah perubahan, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung selama Tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung;
2. Menjabarkan rencana strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya di sesuaikan dengan rancangan Renstra tahun 2025 – 2029 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru terbentuk yang sebelumnya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;
3. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran perubahan 2025;
4. Menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi

Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S.D TRIWULAN II DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai TW - II

Dalam keberjalanan implementasi perencanaan pembangunan Priwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2025, berbagai macam perubahan dan dinamika kebijakan baik dari internal maupun eksternal memberikan dampak pada perubahan kebijakan, khususnya dalam perwujudan program, kegiatan dan subkegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi evaluasi Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA 2025

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANADUNG

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d maret (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Nilai LAKIP DISBUDPAR 2. Persentase aset dalam kondisi baik	78 poin 89%	69.153.474.360	75.55 Poin 92.55%	9.582.872.568	74 poin 92.55%	16.188.981.019	75,55 poin 92.25%	14.010.340.568		86,54	76 poin 89%	15.941.750.273	0 poin 0%	50.716.633.89		73,34
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.310.000.000	20%	136.787.950	100%	410.696.000	100%	330.522.000	40%	80,48	100%	194.000.000	40%	792.079.750	40%	60,46
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	25.514.400	2 Dokumen	65.000.000	2 Dokumen	41.608.000	50%	64,01	2 Dokumen	130.000.000	5 Dokumen	312.742.200	50%	69,50
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	48.000.000	0 dokumen		1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	968.000		48,40	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.968.000		10,35
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	48.000.000	1 dokumen	1.501.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	1.501.000		75,05	1 dokumen	4.000.000	2 dokumen	7.002.000		14,59
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	18.000.000	0 dokumen		1 Dokumen	2.000.000	0 Dokumen	0		0,00	1 dokumen		1 dokumen			0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	2.947.550	1 Dokumen	2.000.000	0 Dokumen	0		0,00	1 Dokumen		0 Dokumen	2.947.550		16,38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	38.000.000	4 Laporan	43.360.000	0 Laporan	38.000.000	0 Laporan	0		0,00	4 Laporan	6.000.000	0 Laporan	49.360.000		129,89
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	690.000.000	2 Laporan	63.465.000	2 Laporan	299.696.000	2 Laporan	286.445.000	50%	95,58	2 Laporan	50.000.000	1 Laporan	415.060.000	50%	60,15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	41.718.195.000	20%	8.197.013.248	100%	9.295.438.294	100%	8.164.935.251	40%	87,84	100%	10.080.859.743	40%	31.093.453.292	40%	74,53

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	40 Orang / Bulan	41.453.195.000	40 Orang Bulan	8.192.713.248	40 Orang	9.295.438.294	40 Orang	8.162.355.257	100%	87,81	40 Orang	10.076.859.748	38 Orang	31.082.573.292	50%	74,98
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										0,00						
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										0,00						
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										0,00						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	15.000.000	1 Laporan	1.720.000	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!	1 Laporan	1.000.000	0 Laporan	2.720.000		18,13
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	250.000.000	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!	2 Laporan	3.000.000	0 Laporan	3.000.000		1,20
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Laporan	2.580.000	0 Laporan		0 Laporan	2.580.000		0,00	0 Laporan		0 Laporan	5.160.000		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	290.000.000	20%		100%	51.518.000	100%	42.780.000	40%	83,04	100%	31.000.000	40%	90.855.000	40%	31,33
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 dokumen	5.000.000	2 dokumen		2 dokumen	1.000.000	2 dokumen		100%	0,00	2 dokumen	1.000.000	0 dokumen	1.000.000		20,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	285.000.000	12 Laporan		12 Laporan	50.518.000	12 Laporan	42.780.000	100%	84,68	12 Laporan	30.000.000	5 Laporan	89.855.000		31,53
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	131.010.000	20%	1.575.000	100%	131.010.000	100%	1.870.000	40%	1,43	100%	14.089.183	40%	22.234.183	40%	16,97
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pegolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 Laporan	131.010.000	24 Laporan	1.575.000	12 Laporan	131.010.000	12 Laporan	1.870.000		1,43	12 Laporan	14.089.183	5 Laporan	22.234.183		16,97
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100.000.000	20%	42.759.200	100%		100%	42.759.200		#DIV/0!	100%	172.500.000	0%	258.018.400		258,02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										0,00						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 stel		100 stel	42.759.200	0 stel		0 stel	42.759.200		0,00	0 stel		0 stel	85.518.400		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0,00	0 Pegawai		0 Pegawai			
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0,00	0 Pegawai		0 Pegawai			
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0,00	0 Pegawai		0 Pegawai			

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0,00	0 Pegawai		0 Pegawai			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	100.000.000	0 Orang		0 Orang		0 Orang			0,00	68 Orang	172.500.000	0 Orang	172.500.000		172,50
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang			0,00	0 Orang		0 Orang			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.285.000.000	20%	379.259.326	100%	1.118.633.300	100%	947.853.697	40%	84,73	100%	519.511.000	40%	2.094.958.623	40%	91,68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	150.000.000	1 Paket	29.457.200	2 Paket	280.507.900	1 Paket	217.440.196	40%	77,52	1 Paket	50.000.000	0,5 Paket	346.889.296	40%	231,26
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	500.000.000	1 Paket	227.728.002	2 Paket	374.500.000	2 Paket	316.217.343	40%	84,44	1 Paket	100.000.000	1 Paket	660.605.345	40%	132,12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	1 Paket	15.384.390	1 Paket	74.855.400	1 Paket	74.853.300	40%	100,00	1 Paket	61.011.000	0,5 Paket	183.389.590	40%	183,39
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	1 Paket	27.879.604	1 Paket	20.000.000	1 Paket	19.967.000	40%	99,84	1 Paket	20.000.000	0,5 Paket	81.087.104	40%	81,09
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	405.000.000	1 Paket	26.830.530	1 Paket	96.000.000	1 Paket	89.467.864	40%	93,20	1 Paket	80.000.000	0,5 Paket	228.965.594	40%	56,53
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	5.409.600	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	5.950.000	40%	99,17	12 Dokumen	8.500.000	5 Dokumen	21.614.600	40%	72,05
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	250.000.000	1 Paket	4.400.000	1 Paket	91.770.000	1 Paket	72.468.000	40%	78,97	1 Paket	20.000.000	0,5 Paket	112.653.600	40%	45,06
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	250.000.000	12 laporan	8.460.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	37.560.000	40%	75,12	12 laporan	50.000.000	5 laporan	102.580.000	40%	41,03
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	500.000.000	24 laporan	33.710.000	12 laporan	125.000.000	12 laporan	113.930.000	40%	91,14	12 laporan	130.000.000	5 laporan	357.173.500	40%	71,43
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	550.000.000	20%	411.623.000	100%	109.315.000	100%	203.307.000	100%	185,98	100%	50.000.000	100%	714.430.000	100%	129,90
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			

Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Unit	125.000.000	11 Unit	21.200.000	1 Unit	4.700.000	0 Unit	4.700.000		0,00	0 Unit		0 Unit	25.900.000		20,72
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	250.000.000	14 Unit	296.153.000	9 Unit	104.615.000	9 Unit	104.337.000	100%	99,73	9 Unit	50.000.000	9 Unit	499.990.000	100%	200,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 Unit	175.000.000	20 Unit	94.270.000	0 Unit		0 Unit	94.270.000		0,00	0 Unit		0 Unit	188.540.000		107,74
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20.744.269.360	20%		100%	4.595.990.425	100%	3.911.370.10	40%	85,10	100%	4.619.790.340	40%	14.468.848.689	40%	69,75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	3.650.000.000	12 Laporan	346.374.833	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	394.512.75	40%	65,75	12 Laporan	650.000.000	5 Laporan	1.675.035.65	40%	45,89
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	17.094.269.360	12 Laporan	3.381.946.426	12 Laporan	3.995.990.425	12 Laporan	3.516.857.34	40%	88,01	12 Laporan	3.969.790.340	5 Laporan	12.793.813.03	40%	74,84
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.125.000.000	20%	456.614.044	100%	476.380.000	100%	407.702.51	40%	85,58	100%	260.000.000	40%	1.181.755.952	40%	55,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	250.000.000	1 Unit	73.713.693	1 Unit	46.530.000	1 Unit	27.718.203	40%	59,57	1 Unit	50.000.000	1 Unit	162.245.974	40%	64,90

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	800.000.000	16 Unit	6.291.000	15 Unit	138.850.000	15 Unit	92.869.305	40%	66,88	15 Unit	110.000.000	11 Unit	236.965.627	40%	29,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara										0,00						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	250.000.000	17 Unit	22.977.200	53 Unit	121.000.000	53 Unit	118.500.000	40%	97,93	53 Unit	82.000.000	11 Unit	233.297.200	40%	93,32
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	250.000.000	25 Unit	48.895.000	0 Unit	50.000.000	0 Unit	50.000.000		0,00	0 Unit		0 Unit	107.895.000		43,16
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara										0,00						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	575.000.000	2 Unit	304.737.15	1 Unit	120.000.000	1 Unit	118.615.000		98,85	1 Unit	18.000.000	0 Unit	441.352.15		76,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi										0,00						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										0,00						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yangDilakukan Pemelharaan / Rehabilitasi										0,00						
Jumlah 1											#DIV/0!		15.941.750.273		50.716.633.89		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											#DIV/0!		8.221.530.680		20.080.479.793		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. Jumlah Desa Wisata yang ditata 2. Jumlah Destinasi Baru	5 Desa 3 Destinasi	15.333.755.000	3 Desa 0 Destinasi		1 Desa 0 Destinasi	3.686.441.875	1 Desa 0 Destinasi			0,00	1 Desa 0 Destinasi	8.221.530.680	0 Desa 0 Destinasi	20.080.479.793		130,96
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang terkelola	1%	300.000.000	0,50%	269.643.320	0%		0%			0,00	0%		0%	269.643.320		89,88
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi			0,00	0 Lokasi		0 Lokasi			
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Pengembangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	300.000.000	2 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi			0,00	0 Lokasi		0 Lokasi			0,00

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 dokumen		1 dokumen	269.643.320	0 dokumen		0 dokumen			0,00	0 dokumen		0 dokumen	269.643.320		
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	30%	7.392.000.000	30%	1.690.220.296	30%	1.119.075.000	30%	1.705.502.75		152,40	30%	968.531.570	0%	4.401.148.123		59,54
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.200.000.000	2 dokumen	656.821.000	0 dokumen		0 dokumen	656.821.000		0,00	0 dokumen		0 dokumen	1.313.642.000		109,47
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi		1 Lokasi	149.391.000	0 Lokasi		0 Lokasi	149.391.000		0,00	0 Lokasi		0 Lokasi	298.782.000		
Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	15 unit	5.342.000.000	2 unit	884.008.296	4 unit	969.075.000	4 unit	834.370.75	100%	86,10	4 unit	888.531.570	1 unit	2.642.032.123	10%	49,46
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										0,00						
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan kawasan strategisPariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	700.000.000	0 Laporan		3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	64.920.000	50%	43,28	3 Laporan	80.000.000	1 Laporan	146.692.000	30%	20,96
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	150.000.000	1 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi			0,00	0 Lokasi		0 Lokasi			0,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	1%	7.291.755.000	1%	5.113.330.350	1%	2.567.366.875	1%	2.329.853.44		90,75	1%	7.252.999.110	0%	15.340.394.450		210,38
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Destinasi		0 Destinasi		0 Destinasi		0 Destinasi			0,00	0 Destinasi		0 Destinasi			
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.250.000.000	8 dokumen	756.673.300	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	98.512.252	100%	98,51	5 dokumen	650.000.000	1 dokumen	1.616.437.552	20%	129,32
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	1.200.000.000	1 Lokasi	98.932.900	0 Lokasi		0 Lokasi			0,00	0 Lokasi		0 Lokasi	98.932.900		8,24
Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	15 Unit	3.406.900.000	12 Unit	3.979.690.450	8 Unit	1.846.395.875	8 Unit	1.769.324.57	100%	95,83	8 Unit	6.072.359.210	1 Unit	12.222.124.879	10%	358,75
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	886.420.000	4 Laporan	257.048.900	12 Laporan	211.284.000	12 Laporan	119.952.46		56,77	12 Laporan	420.952.900	3 Laporan	893.149.16		100,76
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Lokasi	548.435.000	1 Lokasi	20.984.800	3 Lokasi	409.687.000	3 Lokasi	342.064.15		83,49	3 Lokasi	109.687.000	1 Lokasi	509.749.95		92,95
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	100%	350.000.000	40%	15.000.000	100%	66.000.000	100%	54.293.90		100%	0%		0%	69.293.900		19,80
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	18 Dokumer	350.000.000	11 Dokumen	15.000.000	10 Dokumer	66.000.000	10 Dokumen	54.293.90	100%	82,26	0 Dokumen		0 Dokumen	69.293.900		19,80
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			0,00	0 Unit		0 Unit			
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	25%	8.452.200.000	160%	3.876.074.889	5%	3.665.970.000	5%	3.455.884.84		94,27	5%	3.479.440.000	0%	12.068.610.33		142,79
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online	10 Kegiatan	8.452.200.000	4 Kegiatan	3.876.074.889	2 Kegiatan	3.665.970.000	2 Kegiatan	3.455.884.84	50%	94,27	2 Kegiatan	3.479.440.000	1 Kegiatan	12.068.610.33	50%	142,79
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumer	2.822.500.000	4 Dokumen	613.040.000	2 Dokumen	808.525.000	2 Dokumen	806.394.80	100%	99,74	2 Dokumen	274.500.000	1 Dokumen	1.808.434.80	25%	64,07
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Laporan	2.579.700.000	4 Laporan	2.418.329.929	4 Laporan	805.770.000	4 Laporan	675.538.00	100%	83,84	4 Laporan	1.950.940.000	2 Laporan	6.060.678.92	50%	234,94
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	1.200.000.000	2 Dokumen	194.695.000	2 Dokumen	426.985.400	2 Dokumen	410.940.15	100%	96,24	2 Dokumen	204.000.000	1 Dokumen	849.535.15	10%	70,79
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumer	900.000.000	2 Dokumen	650.009.960	2 Dokumen	1.624.689.600	2 Dokumen	1.563.011.89	100%	96,20	2 Dokumen	950.000.000	1 Dokumen	3.249.961.45	10%	361,11
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	950.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			#DIV/0!	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	100.000.000		10,53

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI	5%	1.000.000.000	0,50%	197.995.000	0%	30.000.000	0%			0,00	0%		0%	227.929.000		22,79
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah creative Hub (simpul ekonomi kreatif) yang terbentuk	2 Hub	450.000.000	1 Hub	197.995.000	0 Hub		0 Hub			0,00	0 Hub		0 Hub	197.995.000		44,00
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Kreatif Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota	40 unit	450.000.000	31 unit	197.995.000	0 unit		0 unit			#DIV/0!	0 unit		0 unit	197.995.000		44,00
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jejaring Komunitas Ekraf yang di bina	2 Komunitas	550.000.000	0 Komunitas		0 Komunitas	30.000.000	0 Komunitas			0,00	0 Komunitas		0 Komunitas	29.934.000		5,44
Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bag Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			
Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	0 unit		0 unit		0 unit		0 unit			0,00	0 unit		0 unit			
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan			0,00	0 laporan		0 laporan			
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	5 Dokumen	550.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	29.934.000	100%	99,78	5 Dokumen		5 Dokumen	29.934.000		5,44
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwsata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	25%	13.100.228.790	5%	984.127.300	5%	6.701.099.790	5%	6.305.939.417		94,10	5%	2.793.846.500	0%	11.497.464.017		87,77
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan	3500 Orang	11.400.228.790	1500 Orang	984.127.300	500 Orang	6.681.099.790	500 Orang	6.296.139.417		94,24	500 Orang	2.483.846.500	0 Orang	11.129.693.017		97,63

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	500 orang	1.335.000.000	400 orang	348.750.000	200 orang	250.000.000	200 orang	197.033.500	50%	78,81	2200 orang	1.117.072.500	1050 orang	2.186.981.500	50%	163,82
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	500 Orang	1.000.000.000	150 Orang	99.849.800	800 Orang	1.400.699.000	800 Orang	1.489.485.600	55%	106,34	715 Orang	941.774.000	400 Orang	3.032.563.700	55%	303,26
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1000 Orang	2.204.508.130	1410 Orang	237.440.000	1300 Orang	1.404.509.730	1300 Orang	1.217.144.000		86,66	0 Orang		0 Orang	1.454.584.000		65,98
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	400 Orang	925.000.000	0 Orang		40 Orang	125.000.000	40 Orang	105.174.000	100%	84,14	0 Orang		0 Orang	105.174.000		11,37
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	10 Laporan	2.797.500.000	2 Laporan	149.999.900	3 Laporan	1.386.960.000	3 Laporan	1.344.528.317	100%	96,94	2 Laporan	425.000.000	1 Laporan	2.259.528.217	50%	80,77
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2700 Orang	3.138.220.660	200 Orang	148.087.600	2000 Orang	2.113.931.060	1900 Orang	1.942.774.000	90%	91,90	0 Orang		0 Orang	2.090.861.600		66,63
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0,00	0 Dokumen		0 Dokumen			
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan	510 Orang	1.700.000.000	20 Orang		20 Orang	20.000.000	20 Orang	9.800.000		49,00	0 Orang	310.000.000	0 Orang	367.771.000		21,63
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	510 Orang	450.000.000	0 Orang		20 Orang	10.000.000	20 Orang	9.800.000	100%	98,00	0 Orang		0 Orang	9.800.000		2,18
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	5 Laporan	210.000.000	0 Laporan		1 Laporan	10.000.000	0 Laporan			0,00	0 Laporan		0 Laporan			0,00
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	400 Orang	1.040.000.000	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0%	#DIV/0!	100 Orang	310.000.000	20 Orang	357.971.000	10%	34,42

Berdasarkan data dari Tabel di atas

1. Realisasi Program dan Kinerja sudah cukup baik meskipun dari realisasi keuangan masih belum optimal.
2. Faktor – Faktor Pendorong dan penghambat target kinerja.

Tabel 2.2
Faktor Pendorong dan Faktror Penghambat Kinerja

NO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Motivasi pimpinan kepada bawahan agar menyelesaikan pekerjaan dengan sesuai rencana dan waktu yang telah di tetapkan.	Kurangnya Pegawai di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Kompetensi pegawai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Masih ada pegawai belum membuat dokumen laporan kegiatan sebagai dasar evaluasi kinerja dan anggaran oleh pimpinan
3	Rapat Internal untuk mengevaluasi setiap perkembangan pekerjaan, yang dilakukan secara rutin oleh pimpinan	Kegiatan terkadang tidak sesuai dengan time line yang di rencanakan
4	Daya tarik Potensi Pariwisata dan budaya di kabupaten bandung sangat diminati wisatawan yang datang ke kabupaten bandung.	Anggaran pemeliharaan Destinasi wisata masih belum sesuai kebutuhan
5	Banyaknya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang belum terkurasi kedalamannya dengan baik	Perlunya kurasi potensi pawisata dan ekraf yang ada di kabupaten bandung

3. Implikasi yang ‘timbul terhadap target capaian program renstra PD Menjadikan dasar untuk mencapai target capaian Kinerja pada tahun berikutnya
4. Kebijakan Kepala PD agar dalam perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tujuan adalah dengan selalu melakukan evaluasi

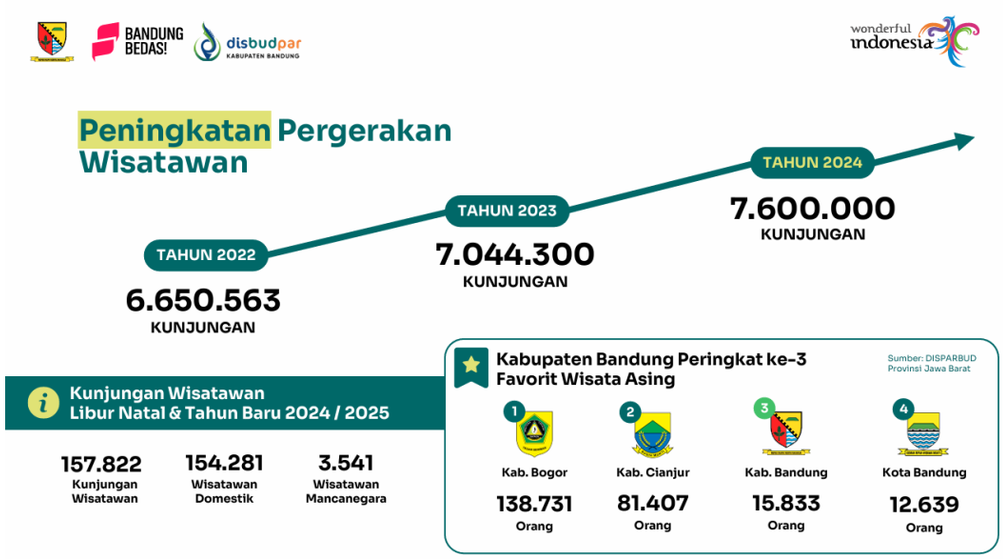
dan pengarahan kepada seluruh pegawai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Krratif sehingga faktor penghambat yang ada dapat di minimalisir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disusun saat RPJMD 2025 – 2029 dan Perubahan Renstra 2025 - 2029 masih dalam tahap rancangan Akhir. Sehingga sinkronisasi visi misi bupati dengan tujuan, sasaran strategis dinas dapat terlihat benang merahnya kesesuaiannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kewajiban penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (Satu) tahun. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam perencanaan, penyusunan rencana program kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk perencanaan satu tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025 memliki tugas kinerja pelayanan sebagai berikut :

Gambar 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG



2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung pada tahun 2025, dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah cukup baik. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada RKPD dan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu aspek dalam menunjang pencapaian yang tinggi pada kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas pengendalian atau monitoring yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, dinas berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor unggulan daerah, meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas peluang usaha kreatif, serta mewujudkan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan yang masih menjadi hambatan, antara lain masih terbatasnya infrastruktur penunjang destinasi wisata, rendahnya kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, lemahnya promosi berbasis digital, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Permasalahan ini menuntut langkah-langkah strategis yang terarah agar potensi pariwisata dan ekonomi kreatif

daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Tabel 2.3
Permasalahan Urusan Kepariwisataan

URUSAN	MASALAH	KET
Kepariwisataan	Belum terbentuknya Branding Pariwisata Kabupaten Bandung.	
	Perlunya Reviu Dokumen RIPPARDA Kabupaten Bandung berdasarkan rekomendasi BPK	
	Potensi Peningkatan Pendapatan dari retribusi pariwisata yang dikelola Disbudpar harus dioptimalkan	
	Desa Wisata yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan harus lebih dimonitor perkembangannya	
	Perlunya kerjasama dan kolaborasi dengan mitra kerja pariwisata agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung	
	Masih banyak destinasi wisata yang tidak berizin	
	Perlunya pendataan potensi pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung	

2.3.3. Dampak Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program

Sesuai dengan visi Kabupaten Bandung “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” dan misi ke-2 yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan”. Maka untuk tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung sesuai dengan Renstra 2025-2028 terbaru ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif

TUJUAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN PD	INDIKATTOR SASARAN
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Meningkatnya Kualitas Pariwisata Kabupaten Bandung	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur pendukung yang belum merata, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Namun di balik tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti perkembangan teknologi informasi yang mendorong digitalisasi layanan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong inovasi pelayanan publik. Dengan mengelola tantangan dan memaksimalkan peluang secara adaptif dan kolaboratif, diharapkan pelayanan perangkat daerah dapat menjadi lebih responsif, efektif, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Tabel 2.5
Tantangan dan Peluang Kinerja

NO	TANTANGAN	PELUANG
1	Apakah Pengelola Desa wisata yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing- masing desa wisata memiliki kompetensi yang cukup untuk	Banyaknya Desa wisata yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa wisata sebagai dasar pengembangan desa wisata di kabupaten bandung

	mengembangkan desa wisata tersebut	
2	Banyaknya Industri Pariwisata yang belum CHSE	Melakukan sosialisasi kepada pengusaha pariwisata untuk berupaya mengikuti anjuran pemerintah tentang pentingnya penerapan CHSE
3	RIPPARDA Kabupaten Bandung perlu di reviu berdasarkan rekomendasi BPK	Anggaran untuk Reviu RIPPARDA KEPARIWISATAAN sudah tersedia
4	Banyaknya Pegawai yang pensiun	Regenerasi Pegawai Disbudpar untuk menutupi kekosongan jabatan
5	Pendapatan asli daerah sektor pariwisata harus meningkat	Objek wisata curug cinulang harus di Tarik retribusi pendapatannya.
6	Data Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif harus update sebagai dasar pengambilan kebijakan pimpinan	Dukungan Pimpinan untuk Kemajuan Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung
7	Belum terfasilitasinya pendaftaran HAKI pelaku ekraf kabupaten bandung	Banyak pelaku ekraf di kabupaten bandung
8	Sertifikasi pelaku ekraf dan pariwisata masih minim	Banyaknya pelaku ekraf dan pariwisata di kabupaten bandung

2.3.5. Isu – isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencerminkan tantangan dan peluang dalam pengembangan sektor pariwisata serta peningkatan kontribusi ekonomi kreatif daerah. Isu tersebut mencakup aspek penguatan destinasi wisata, peningkatan daya saing pelaku ekonomi kreatif, pengembangan SDM pariwisata, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pelayanan. Penanganan isu-isu ini menjadi penting guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang adaptif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika global.

Untuk menindaklanjuti isu–isu di atas dalam perumusan program dan kegiatan yang akan di laksanakan maka DISPAREKRAF mempunyai beberapa strategi yang akan di laksanakan untuk menghadapi isu – isu strategis DISPAREKRAF.

a. Kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan pariwisata Kabupaten Bandung.
b. Merencanakan Reviu RIPPARDA Kabupaten Bandung
c. Sosialisasi pentingnya CHSE kepada Industri pariwisata Kabupaten Bandung
d. Mengusulkan kebutuhan ASN DISPAREKRAF ke BKPSDM Kabupaten Bandung
e. Optimalisasi objek wisata yang di kelola DISPAREKRAF untuk meningkatkan PAD sektor pariwisata
f. Melaksanakan pendataan pariwisata dan ekraf secara berkal
g. Fasilitasi pendaftraan HAKI bagi pelaku ekraf
h. Pendampingan pengembangan Desa Wisata
i. Sertifikasi pelaku eraf dan pariwisata

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Review Renja Terhadap Analisis Kebutuhan
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Bandung

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	- Nilai LAKIP DISPAREKRAF - Persentase Aset dalam kondisi baik	DISPAREKRAF	77 Poin 93.00%	16,938,113,106	DISPAREKRAF	77 Poin 93.00%	19,789,431,455
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPAREKRAF	100%	268,000,000	DISPAREKRAF	100%	388,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISPAREKRAF	2 Dokumen	186,000,000	DISPAREKRAF	2 Dokumen	200,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPAREKRAF	1 Dokumen	6,000,000	DISPAREKRAF	1 Dokumen	6,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPAREKRAF	1 Dokumen	6,000,000	DISPAREKRAF	1 Dokumen	6,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DISPAREKRAF	1 Dokumen	5,000,000	DISPAREKRAF	0 Dokumen	5,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DISPAREKRAF	1 Dokumen	5,000,000	DISPAREKRAF	0 Dokumen	5,000,000

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	DISPAREKRAF	4 Dokumen	10,000,000	DISPAREKRAF	4 Dokumen	16,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPAREKRAF	3 Dokumen	50,000,000	DISPAREKRAF	3 Dokumen	75,000,000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DISPAREKRAF	0 Dokumen	-	DISPAREKRAF	1 Dokumen	2,500,000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	DISPAREKRAF	0 Data	-	DISPAREKRAF	3 Data	72,500,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPAREKRAF	100%	10,213,120,766	DISPAREKRAF	100%	11,762,791,715
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DISPAREKRAF	40 Orang	10,209,120,766	DISPAREKRAF	41 Orang	11,758,791,715
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPAREKRAF	2 laporan	1,000,000	DISPAREKRAF	1 laporan	1,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	DISPAREKRAF	1 laporan	3,000,000	DISPAREKRAF	2 laporan	3,000,000

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPAREKRAF	100%	40,000,000	DISPAREKRAF	100%	40,000,000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPAREKRAF	2 Dokumen	2,000,000	DISPAREKRAF	0 Dokumen	2,000,000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPAREKRAF	12 laporan	38,000,000	DISPAREKRAF	12 laporan	38,000,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	DISPAREKRAF	100%	20,202,000	DISPAREKRAF	100%	20,202,000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DISPAREKRAF	12 Laporan	20,202,000	DISPAREKRAF	12 Laporan	20,202,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPAREKRAF	100%	234,000,000	DISPAREKRAF	100%	274,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DISPAREKRAF	70 Orang	234,000,000	DISPAREKRAF	75 Orang	234,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DISPAREKRAF	0 paket	-	DISPAREKRAF	70 Orang	40,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPAREKRAF	100%	653,000,000	DISPAREKRAF	100%	784,072,400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DISPAREKRAF	1 paket	50,000,000	DISPAREKRAF	1 paket	100,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DISPAREKRAF	1 paket	225,000,000	DISPAREKRAF	1 paket	225,000,000

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DISPAREKRAF	1 paket	17,000,000	DISPAREKRAF	1 paket	28,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DISPAREKRAF	1 paket	20,000,000	DISPAREKRAF	1 paket	30,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	DISPAREKRAF	1 paket	91,000,000	DISPAREKRAF	1 paket	91,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	DISPAREKRAF	12 Dokumen	10,000,000	DISPAREKRAF	12 Dokumen	10,000,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DISPAREKRAF	1 paket	20,000,000	DISPAREKRAF	1 paket	30,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISPAREKRAF	12 laporan	50,000,000	DISPAREKRAF	12 laporan	70,072,400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISPAREKRAF	150 laporan	170,000,000	DISPAREKRAF	150 laporan	200,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISPAREKRAF	100%	185,000,000	DISPAREKRAF	100%	185,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DISPAREKRAF	2 Unit	90,000,000	DISPAREKRAF	2 unit	90,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DISPAREKRAF	1 paket	20,000,000	DISPAREKRAF	2 unit	20,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DISPAREKRAF	1 Unit	25,000,000	DISPAREKRAF	1 Unit	25,000,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	DISPAREKRAF	0 Unit	-	DISPAREKRAF	0 Unit	-

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DISPAREKRAF	2 unit	50,000,000	DISPAREKRAF	2 unit	50,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPAREKRAF	100%	4,957,790,340	DISPAREKRAF	100%	6,027,790,340
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DISPAREKRAF	12 Laporan	650,000,000	DISPAREKRAF	12 Laporan	750,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DISPAREKRAF	12 Laporan	4,307,790,340	DISPAREKRAF	12 Laporan	5,277,790,340
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPAREKRAF	100%	295,000,000	DISPAREKRAF	100%	235,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DISPAREKRAF	1 Unit	45,000,000	DISPAREKRAF	1 Unit	45,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DISPAREKRAF	15 Unit	160,000,000	DISPAREKRAF	15 Unit	90,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DISPAREKRAF	50 Unit	40,000,000	DISPAREKRAF	25 Unit	50,000,000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	DISPAREKRAF	20 Unit	-	DISPAREKRAF	0 Unit	-

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	DISPAREKRAF	0 Unit	50,000,000	DISPAREKRAF	4 Unit	50,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DISPAREKRAF	0 Unit	-	DISPAREKRAF	0 Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DISPAREKRAF	1 Gedung	-	DISPAREKRAF	0 Gedung	-
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	DISPAREKRAF		72,000,000	DISPAREKRAF	100%	72,575,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	DISPAREKRAF	2 Orang / Bulan	72,000,000	DISPAREKRAF	2 Orang / Bulan	72,575,000
Jumlah 1				16,938,113,106			19,789,431,455
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Desa Wisata yang ditata	Kabupaten Bandung	3 Desa	4,115,316,200	Kabupaten Bandung	3 Desa	4,244,316,200
	Jumlah Destinasi Wisata Baru		1 Destinasi Wisata			1 Destinas Wisata	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Prosentase Daya Tarik Wisata yang dikelola	Kabupaten Bandung	1%	-	Kabupaten Bandung	0%	-
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	0 Lokasi	-	Kabupaten Bandung	0 Lokasi	-

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Kabupaten Bandung	50 Orang	-	Kabupaten Bandung	0 Orang	-
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kabupaten Bandung	0 Lokasi	-	Kabupaten Bandung	0 Lokasi	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan strategis pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	Kabupaten Bandung	30%	-	Kabupaten Bandung	30%	-
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	0 Dokumen		Kabupaten Bandung	0 Dokumen	
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	-	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	3 Unit	-	Kabupaten Bandung	0 Unit	-

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kabupaten Bandung	50 Orang	-	Kabupaten Bandung	0 Orang	-
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	0 Lokasi	-	Kabupaten Bandung	0 Lokasi	-
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	Kabupaten Bandung	1%	3,508,351,000	Kabupaten Bandung	1%	3,787,351,000
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	-	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	-
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	-
Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Kabupaten Bandung	0 Dokumen		Kabupaten Bandung	0 Dokumen	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kabupaten Bandung	1 Destinasi	-	Kabupaten Bandung	0 Destinasi	-
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kabupaten Bandung	2 Unit	2,671,380,000	Kabupaten Bandung	5 Unit	2,355,380,000

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	0 laporan	-	Kabupaten Bandung	0 laporan	-
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	1 Laporan	527,284,000	Kabupaten Bandung	1 Laporan	1,222,284,000
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	1 Lokasi	309,687,000	Kabupaten Bandung	1 Lokasi	209,687,000
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang terlayani	Kabupaten Bandung	100%	606,965,200	Kabupaten Bandung	100%	456,965,200
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	-	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Kabupaten Bandung	0 Industri	-	Kabupaten Bandung	0 Industri	-
Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kabupaten Bandung	0 Laporan	-	Kabupaten Bandung	0 Laporan	-
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Kabupaten Bandung	0 Usaha	306,965,200	Kabupaten Bandung	20 Usaha	156,965,200

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Kabupaten Bandung	0 Usaha	-	Kabupaten Bandung	0 Usaha	-
Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Kabupaten Bandung	0 Usaha	-	Kabupaten Bandung	0 Usaha	-
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Kabupaten Bandung	0 Usaha	300,000,000	Kabupaten Bandung	20 Usaha	300,000,000
Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Kabupaten Bandung	0 Usaha	-	Kabupaten Bandung	0 Usaha	-
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0 Usaha	1,675,439,600	Kabupaten Bandung	0 Usaha	2,550,439,600
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online	Kabupaten Bandung	2 kegiatan	1,675,439,600	Kabupaten Bandung	2 kegiatan	2,550,439,600
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bandung	2 dokumen	224,500,000	Kabupaten Bandung	2 dokumen	224,500,000

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bandung	2 laporan	800,939,600	Kabupaten Bandung	2 laporan	1,400,939,600
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	250,000,000	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	250,000,000
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	200,000,000	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	475,000,000
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	200,000,000	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	200,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI	Kabupaten Bandung	1%	230,000,000	Kabupaten Bandung	1%	580,000,000
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah creative Hub yang terbentuk	Kabupaten Bandung	2 Hub	-	Kabupaten Bandung	2 Hub	-
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kabupaten Bandung	1 Unit	-	Kabupaten Bandung	1 Unit	-
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunitas Ekraf	Kabupaten Bandung	2 Komunitas	230,000,000	Kabupaten Bandung	2 Komunitas	580,000,000

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Kabupaten Bandung	0 Dokumen		Kabupaten Bandung	0 Dokumen	
Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	1 Laporan	50,000,000	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	200,000,000
Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	0 Unit	-	Kabupaten Bandung	0 Unit	-
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	Kabupaten Bandung	0 Dokumen		Kabupaten Bandung	0 Dokumen	
Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Kabupaten Bandung	Promosi	80,000,000	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	130,000,000
Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Kabupaten Bandung	0 Orang	-	Kabupaten Bandung	0 Orang	-
Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	Kabupaten Bandung	0 Pelaku usaha		Kabupaten Bandung	0 Pelaku usaha	
Penyusunan Skema Insentif Daerah	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	Kabupaten Bandung	0 Dkumen		Kabupaten Bandung	0 Dkumen	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kabupaten Bandung	0 Orang	-	Kabupaten Bandung	0 Orang	-
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	0 Produk	100,000,000	Kabupaten Bandung	2 Produk	250,000,000
Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	-	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	-
Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Kabupaten Bandung	0 Dokumen		Kabupaten Bandung	0 Dokumen	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	-
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Kabupaten Bandung	0 Lembaga	-	Kabupaten Bandung	1 Lembaga	-
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwsata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	Kabupaten Bandung	5%	1,460,072,400	Kabupaten Bandung	5%	1,825,000,000

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan	Kabupaten Bandung	500 Orang	846,072,400	Kabupaten Bandung	500 Orang	1,425,000,000
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)	Kabupaten Bandung	200 Orang	-	Kabupaten Bandung	0 Orang	-
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Kabupaten Bandung	100 Orang	265,000,000	Kabupaten Bandung	100 Orang	975,000,000
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Bandung	50 Orang	250,000,000	Kabupaten Bandung	100 Orang	250,000,000
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	3 Laporan	200,000,000	Kabupaten Bandung	3 Laporan	200,000,000
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	200 Orang	131,072,400	Kabupaten Bandung	0 Orang	-
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	0 laporan	-	Kabupaten Bandung	0 laporan	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	LOKASI	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf	Kabupaten Bandung	5%	614,000,000	Kabupaten Bandung	5%	400,000,000
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	100 Peserta	110,000,000	Kabupaten Bandung	0 Peserta	-
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kabupaten Bandung	1 Laporan	-	Kabupaten Bandung	0 Laporan	-
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	100 Orang	504,000,000	Kabupaten Bandung	200 Orang	400,000,000
Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	Kabupaten Bandung	0 Lembaga	-	Kabupaten Bandung	0 Lembaga	-
Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	0 Orang	-	Kabupaten Bandung	0 Orang	-
Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	0 Orang	-	Kabupaten Bandung	0 Orang	-
Jumlah 2				10,319,179,850			14,860,507,450
Jumlah Total				27,257,292,956			34,649,938,905

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Usulan tersebut dihimpun melalui berbagai tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Penelaahan dilakukan untuk memastikan bahwa usulan yang diajukan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta sesuai dengan kewenangan dan tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Proses ini juga bertujuan untuk menilai kelayakan, relevansi, dan urgensi dari setiap usulan agar dapat diakomodasi secara optimal dalam rencana kerja perangkat daerah.

2.5.1 Telaahan Terhadap usulan Musrenbang

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

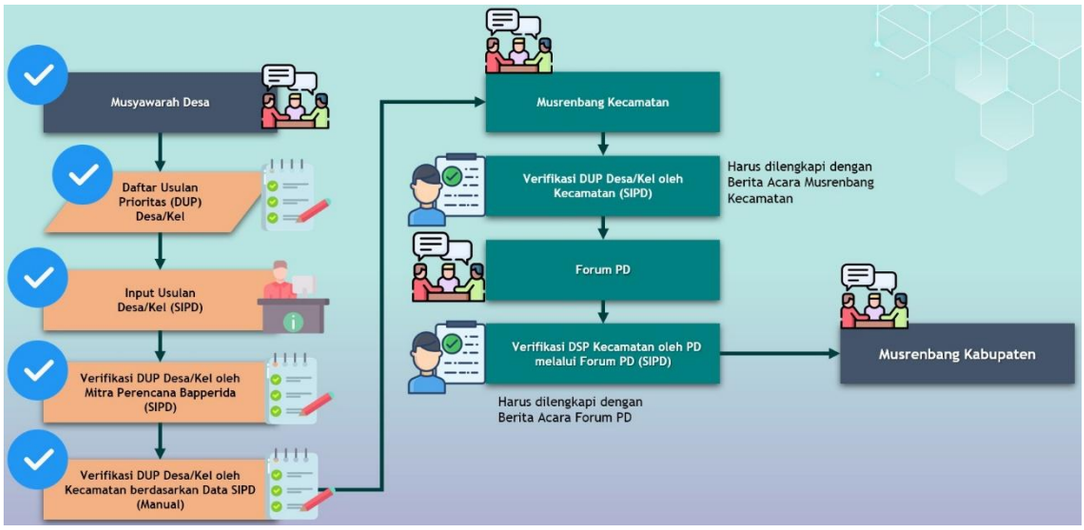
Pada konteks rencana kerjanya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program kinerja yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan arah kebijakan strategis daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap berbagai usulan yang masuk melalui proses Musrenbang. Kajian ini penting

untuk mengidentifikasi tingkat urgensi, relevansi, serta kesesuaian usulan dengan visi dan misi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Selain itu, proses ini juga dimaksudkan untuk menyaring dan memprioritaskan usulan yang memiliki potensi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat langsung, Lembaga Masyarakat, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun yang langsung ditujukan ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Berikut alur usulan musrenbang kecamatan :

Gambar 2.2
Alur Pelaksanaan Musrenbang



Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bandung secara konsisten melaksanakan proses perencanaan yang transparan dan akuntabel. Salah satu instrumen penting dalam proses ini adalah pelibatan aktif masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi salah satu tahapan penting dalam menjaring aspirasi dan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten, dengan tujuan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta rencana strategis perangkat daerah. Melalui forum ini, berbagai masukan dan saran dihimpun guna mendukung penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun anggaran yang akan datang.

Dari hasil pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan, terdapat usulan program/ kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung berdasarkan kriteria teknis yang telah ditetapkan. Adapun daftar usulan musrenbang untuk kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	KECAMATAN	VOL	SATUAN
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Ibun	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Ciwidey	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Banjaran	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Cilengkrang	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Pasirjambu	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Kutawaringin	50	PESERTA

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	KECAMATAN	VOL	SATUAN
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Paseh	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Pacet	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Pangalengan	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Solokanjeruk	50	EVENT
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Cileunyi	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Cimenyan	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Kutawaringin	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Cilengkrang	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Arjasari	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Kutawaringin	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Solokanjeruk	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Ibun	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Nagreg	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Ciparay	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Kertasari	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Cilengkrang	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Ciwidey	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Cimaung	50	PESERTA
			#MS Pelatihan Tatakelola Desa Wisata	Banjaran	50	PESERTA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	#MS Pendampingan Desa Wisata	Ciwidey	1	KEGIATAN

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	KECAMATAN	VOL	SATUAN
			#MS Pendampingan Desa Wisata	Rancabali	1	KEGIATAN
			#MS Pendampingan Desa Wisata	Pameungpeuk	1	KEGIATAN
			#MS Pendampingan Desa Wisata	Pasirjambu	1	KEGIATAN
			#MS Pendampingan Desa Wisata	Cangkuang	1	KEGIATAN
			#MS Pendampingan Desa Wisata	Katapang	1	KEGIATAN
			#MS Pendampingan Desa Wisata	Margaasih	1	KEGIATAN
			#MS Pendampingan Desa Wisata	Cimenyan	1	KEGIATAN
			#MS Pendampingan Desa Wisata	Kertasari	1	KEGIATAN

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi terkait pariwisata dan ekonomi kreatif

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Perubahan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2026.

Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan program kinerja secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja Perubahan juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (RPJMN 2025-2029)

RPJMN 2025–2029 menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas dalam penguatan ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Fokus utama kebijakan pariwisata dalam dokumen ini meliputi peningkatan daya saing destinasi pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan, transformasi digital sektor pariwisata, serta peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga menekankan pentingnya keterpaduan antar sektor dan wilayah dalam mengembangkan ekosistem pariwisata yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga berbasis budaya, lingkungan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan nasional ini diarahkan pada pengembangan destinasi prioritas nasional, penguatan desa wisata, dan peningkatan kualitas layanan pariwisata melalui sertifikasi kompetensi dan standardisasi. Selain itu, RPJMN 2025–2029 mendorong peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang destinasi, termasuk aksesibilitas, fasilitas kebersihan, dan digitalisasi informasi pariwisata. Transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam pengelolaan data wisatawan, promosi daring, serta integrasi sistem informasi antar pelaku industri pariwisata dan pemerintah.

Sementara itu, sektor ekonomi kreatif dalam RPJMN diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui penguatan inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual. Strategi pengembangan ekraf mencakup fasilitasi pendaftaran HKI, peningkatan kapasitas SDM kreatif, pengembangan subsektor unggulan, serta pembangunan ruang dan ekosistem kreatif di daerah. Pemerintah pusat juga menargetkan pertumbuhan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB melalui transformasi digital industri kreatif dan perluasan pasar, baik domestik maupun internasional.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor atau pendekatan pentahelix (pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media) dalam membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang tangguh. Dalam RPJMN, kolaborasi ini menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai program pengembangan SDM, promosi, penyelenggaraan event, dan pemberdayaan komunitas. Selain itu, peran data dan riset juga ditekankan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Secara umum, arah kebijakan nasional dalam RPJMN ini menjadi panduan dan acuan penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bandung, dalam menyusun dan menyesuaikan strategi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kabupaten/kota yang memiliki potensi wisata dan ekraf diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh kebijakan pusat, baik dalam bentuk sinergi

program, fasilitasi anggaran, maupun dukungan teknis kelembagaan dan SDM.

2. Telaahan Kebijakan Provinsi Jawa Barat (RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029)

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029, kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama pembangunan adalah pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan investasi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini tercermin dalam Lengkah Kaopat (langkah keempat) dari "9 Lengkah Ngawangun Jabar Istimewa", yang secara eksplisit mencantumkan "pengembangan pariwisata" dan "ekonomi kreatif" sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, serta perdagangan jasa lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan peningkatan proporsi PDRB dari subsektor ini melalui penciptaan destinasi unggulan, penguatan atraksi lokal berbasis budaya, dan digitalisasi layanan pariwisata. Selain itu, ada penekanan pada pembangunan infrastruktur jalan, konektivitas antarwilayah, dan integrasi kawasan wisata yang mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai wilayah di Jawa Barat.

Dalam sektor ekonomi kreatif, RPJMD menyoroti pentingnya penguatan industri kerajinan, kuliner, dan produk lokal lain sebagai bentuk hilirisasi potensi kreatif masyarakat. Upaya ini didorong melalui peningkatan rasio kewirausahaan, fasilitasi promosi dan pemasaran produk ekraf, serta dukungan terhadap peningkatan kontribusi PDRB ekonomi kreatif Jawa Barat terhadap ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah provinsi juga menargetkan peningkatan proporsi pelaku usaha ekonomi kreatif yang terlindungi secara hukum dan mampu

bersaing melalui peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi.

Transformasi digital dan peningkatan kapasitas SDM juga menjadi prioritas dalam pengembangan kedua sektor ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengarahkan kebijakan untuk mendukung peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata yang tersertifikasi, terverifikasi, dan memiliki daya saing, serta mendorong penciptaan ruang-ruang kreatif yang dapat diakses masyarakat secara inklusif. Penguatan branding daerah dan promosi digital lintas platform menjadi strategi utama untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan destinasi Jawa Barat.

Meskipun fokus RPJMD bersifat makro dan provinsial, kebijakan tersebut memberikan ruang besar bagi daerah, termasuk Kabupaten Bandung, untuk menyelaraskan program dan kegiatannya. Kabupaten Bandung sebagai bagian dari kawasan Bandung Raya dan salah satu kantong wisata unggulan di Jawa Barat, memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam kerangka kebijakan provinsi. Penekanan pada desa wisata, industri kreatif berbasis kriya dan kuliner, serta event budaya lokal merupakan bentuk konkret sinergi yang dapat dikuatkan dengan arah kebijakan provinsi.

Dengan demikian, arah kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029 tidak hanya menjadi kerangka strategis bagi pembangunan sektoral, tetapi juga menjadi peluang integratif bagi kabupaten/kota untuk memperkuat peranannya sebagai penggerak ekonomi lokal. Kabupaten Bandung, dengan kekayaan alam dan kreativitas masyarakatnya, dapat menjadi bagian penting dari jaringan kawasan unggulan yang dirancang oleh provinsi dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Telaahan Kebijakan Kabupaten Bandung (RPJMD 2025-2029)

Kebijakan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 diarahkan untuk mendukung misi pembangunan daerah melalui

penguatan sektor unggulan, pengembangan SDM, peningkatan nilai tambah, serta pelestarian budaya lokal. Pariwisata dan ekraf dianggap sebagai penggerak ekonomi baru yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan melibatkan keterpaduan antara promosi destinasi, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dalam aspek pariwisata, dokumen RPJMD menetapkan beberapa program utama, antara lain: program pemasaran pariwisata, peningkatan daya tarik destinasi, dan pengembangan SDM pariwisata. Upaya ini ditunjukkan melalui target indikator seperti peningkatan jumlah desa wisata, destinasi baru, dan jumlah wisatawan nusantara maupun mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung. Dokumen ini juga mengacu pada Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda), dengan menetapkan 13 kawasan pariwisata strategis yang mencerminkan diversifikasi potensi atraksi wisata alam, budaya, dan edukasi.

Sementara dalam pengembangan ekonomi kreatif, kebijakan daerah lebih menitikberatkan pada penguatan ekosistem kreatif melalui program pembinaan SDM ekraf serta fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk-produk kreatif lokal. Kabupaten Bandung mencatat tren peningkatan signifikan pada jumlah pelaku ekraf dari tahun 2021 hingga 2024, serta dominasi sub-sektor kuliner yang memberikan kontribusi besar terhadap struktur usaha mikro di wilayah ini.

Kebijakan strategis lainnya mencakup integrasi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pengembangan kawasan metropolitan Cekungan Bandung. Tujuan ini diformulasikan untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat budaya, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif nasional yang ramah lingkungan dan berbasis pendidikan tinggi serta teknologi. Strategi yang dipilih meliputi konektivitas transportasi

antar wilayah, penguatan infrastruktur pariwisata, dan pelestarian lingkungan sekitar destinasi wisata.

Secara umum, RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 menempatkan sektor pariwisata dan ekraf sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sarana untuk memperluas kesempatan kerja, mendukung pemulihan pascapandemi, serta memperkuat identitas budaya lokal. Upaya ini memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan agar ekosistem pariwisata dan ekraf semakin inovatif dan kompetitif.

Visi Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan 78 Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas". Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
- Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
- Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
- Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung diatas, misi yang secara langsung berkaitan dengan Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah misi 2. Secara jelas maka penjabaran misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.

Dalam misi ini, Disbudpar berperan dalam mendukung pertumbuhan sektor unggulan (Sasaran 2.1), khususnya sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, serta jasa pariwisata dan ekonomi kreatif. Disbudpar menyelenggarakan empat program prioritas:

- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

Berikut adalah langkah-langkah spesifik dan strategi implementatif yang dapat dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif (disparekraf) Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf)**:**

a) Identifikasi dan Pemutakhiran Data Pelaku dan Potensi
   - Melakukan pendataan pelaku pariwisata dan ekraf berbasis desa/kelurahan.
   - Mengintegrasikan data destinasi, event, pelaku ekraf, dan produk unggulan ke dalam sistem informasi digital.
   - Menyusun profil desa wisata dan klaster ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

b) Penguatan Kapasitas SDM Lokal
   - Menyelenggarakan pelatihan keterampilan (homestay management, guiding, storytelling, digital marketing, manajemen ekraf).
   - Mendorong sertifikasi profesi bagi pelaku wisata dan pelaku kreatif sesuai standar BNSP.

- Memberikan pelatihan kepada pengelola desa wisata tentang kelembagaan, keuangan, dan pengembangan paket wisata.

c) Pengembangan Produk dan Destinasi Unggulan

- Menata destinasi berdasarkan potensi unggulan: alam, budaya, pertanian, dan buatan.
- Mengembangkan produk ekraf khas daerah (kuliner, fesyen, kriya) agar memiliki nilai tambah dan daya saing.
- Menyediakan sarana prasarana pendukung destinasi yang berstandar, seperti toilet, jalur akses, papan informasi, dan sentra produk.

d) Fasilitasi Promosi dan Akses Pasar

- Membuat media promosi kreatif berbasis video, website, media sosial, dan platform marketplace.
- Menyelenggarakan event rutin (festival, expo, pasar ekraf) yang mempertemukan pelaku dan pembeli.
- Mengikutsertakan pelaku lokal dalam pameran atau jejaring regional/nasional.

e) Fasilitasi Perlindungan dan Legalitas Usaha

- Memfasilitasi pendaftaran HKI (merek dagang, desain industri, hak cipta) bagi pelaku ekraf.
- Membantu pelaku memperoleh NIB, PIRT, Halal, dan sertifikasi lainnya untuk memperluas pasar.
- Mendorong integrasi pelaku ekraf dalam koperasi, komunitas usaha, atau ekosistem inkubasi usaha.

Dengan menjalankan peran-peran strategis di atas, Disbudpar tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan sektor ekonomi, tetapi juga memperkuat karakter lokal dan memperluas manfaat pembangunan secara lebih inklusif. Disbudpar Kabupaten Bandung memiliki kontribusi strategis dalam pencapaian misi utama daerah: yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekraf (Misi 2). Program-program Disbudpar seperti pengembangan SDM, promosi, dan penguatan destinasi menjadi bagian

integral dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Bandung dan menindaklanjuti arah kebijakan strategis nasional serta Provinsi Jawa Barat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan terbaru.

Renja Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya, dengan mengakomodasi perkembangan isu-isu strategis daerah, potensi unggulan wilayah, serta kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Penyesuaian ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Tujuan: Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan ini mengarah pada upaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Nilai tambah tidak hanya dihitung dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan atau omzet pelaku ekraf, tetapi juga dari kualitas pengalaman wisata, keunikan produk lokal, keberlanjutan usaha, dan pelibatan masyarakat dalam rantai ekonomi sektor ini. Dengan kata lain, tujuan ini bertujuan mendorong agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, inklusif, dan berjangka panjang.

Peningkatan nilai tambah juga berarti adanya transformasi dari model usaha berbasis komoditas mentah atau aktivitas informal menjadi model usaha berbasis inovasi, layanan, dan pengalaman yang bernilai ekonomi tinggi. Contohnya adalah desa wisata yang tidak hanya menyajikan pemandangan, tetapi juga menawarkan paket edukasi, kuliner lokal, homestay, dan produk kriya yang memiliki legalitas dan merek sendiri. Hal ini akan memperkuat posisi sektor pariwisata dan ekraf sebagai sektor unggulan dan strategis di Kabupaten Bandung.

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pariwisata Kabupaten Bandung

Sasaran ini mengukur sejauh mana pariwisata di Kabupaten Bandung telah mengalami perbaikan dari sisi kualitas layanan, pengelolaan destinasi, daya tarik wisata, kenyamanan dan keamanan pengunjung, hingga standar pelayanan pelaku usaha pariwisata. Kualitas pariwisata mencakup aspek amenitas (sarana), aksesibilitas (kemudahan akses), atraksi (daya tarik), serta kompetensi SDM pelaku wisata. Fokusnya bukan hanya pada menarik lebih banyak wisatawan, tetapi bagaimana memberikan pengalaman yang baik, berkesan, dan sesuai standar pelayanan wisata.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan Disparekraf Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Utama Disparekraf Kabupaten Bandung

Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran 2025
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2,43%	Meningkatnya Kualitas Pariwisata Kabupaten Bandung	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	7,747,849

Dalam proses perencanaan strategis pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja menjadi aspek penting yang berfungsi untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Indikator ini tidak hanya menjadi alat ukur yang objektif, tetapi juga menjadi dasar dalam menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah termasuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung perlu memiliki indikator yang selaras dengan tujuan strategis daerah, relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata memiliki peran strategis dalam membentuk identitas daerah, meningkatkan daya saing destinasi, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, perumusan indikator kinerja disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal, tantangan sektoral, serta potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Bandung. Indikator ini mencakup aspek pembangunan pengembangan destinasi dan promosi pariwisata, serta pemberdayaan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sedangkan sasaran terhadap indikator-indikator Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan
Rencana Kerja Tahun 2025 DISPAREKRAF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
- Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum		
		Meningkatnya Kualitas Pariwisata Kabupaten Bandung			Jumlah Kunjungan wisatawan (Ribu Orang)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				presentase kawasan strategis pariwisata yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
				Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Persentase destinasi yang memenuhi standar	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki jaminan usaha	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Persentase destinasi yang memenuhi standar	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	3.26.02.2.03.0009 - Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	3.26.02.2.03.0009 - Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki jaminan usaha	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	
					Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	
					Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	3.26.02.2.04.0008 - Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	
					Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	3.26.02.2.04.0008 - Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	
					Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	3.26.02.2.04.0008 - Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	
					Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	3.26.02.2.04.0009 - Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	
					Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	3.26.02.2.04.0009 - Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	
					Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	
					Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	3.26.02.2.04.0011 - Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	3.26.02.2.04.0011 - Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	3.26.02.2.04.0011 - Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
					Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	3.26.02.2.04.0013 - Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
					Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	3.26.02.2.04.0013 - Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
					Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	3.26.02.2.04.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	
					Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	3.26.02.2.04.0016 - Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	
					Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	3.26.02.2.04.0016 - Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	
					Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	3.26.02.2.04.0016 - Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				presentase kawasan strategis pariwisata yang memenuhi standar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Jumlah zona kreatif/ruang kreatif yang dibangun, direvitalisasi, atau difungsikan secara aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentasi peningkatan Usaha ekonomi kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah Insentif yang Diberikan	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
				Jumlah zona kreatif/ruang kreatif yang dibangun, direvitalisasi, atau difungsikan secara aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
				Persentasi peningkatan Usaha ekonomi kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0003 - Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	
					Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	3.26.04.2.02.0004 - Penyediaan Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Insentif yang Diberikan	3.26.04.2.02.0011 - Fasilitasi pemberian insentif	
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	3.26.04.2.02.0015 - Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
					Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	3.26.04.2.02.0017 - Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	
					Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	3.26.04.2.02.0018 - Penyusunan Skema Insentif Daerah	
					Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	3.26.04.2.02.0019 - Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai AKIP	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Presentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	3.26.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	3.26.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3.26.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	3.26.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3.26.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	3.26.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.26.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Presentase Dokumen pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Presentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Presentase BMD dalam Kondisi Baik	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.26.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.26.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.26.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3.26.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.26.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.26.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3.26.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	3.26.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	3.26.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.26.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3.26.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.26.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.26.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.26.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3.26.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	3.26.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
					Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	3.26.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3.26.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.26.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.26.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.26.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3.26.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.26.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.26.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	3.26.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	3.26.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	3.26.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	3.26.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3.26.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3.26.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.26.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Presentase BMD dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3.26.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3.26.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	3.26.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.26.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3.26.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3.26.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.26.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.26.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	3.26.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Presentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.26.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.26.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.26.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.26.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3.26.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.26.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3.26.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3.26.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3.26.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	3.26.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.26.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3.26.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Presentase Dokumen pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.26.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.26.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3.26.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.26.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.26.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.26.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Presentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem.Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.26.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.26.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.26.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi pembangunan daerah dan memperkuat kontribusi sektor unggulan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung menyelenggarakan empat program prioritas yang menjadi pilar pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Program-program ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya tarik destinasi, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta perlindungan terhadap karya dan inovasi pelaku ekonomi kreatif. Dengan pendekatan yang integratif dan partisipatif, pelaksanaan keempat program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat identitas budaya lokal yang menjadi kekuatan utama Kabupaten Bandung sebagai destinasi unggulan.

3.3.1 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kegiatan dalam program ini mencakup fasilitasi pelatihan dasar dan lanjutan, pengembangan kompetensi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan sektor ini. Luaran yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah SDM yang terlatih dan kompeten, baik dari sisi pelaku usaha maupun aparatur pemerintah daerah

Selain itu, kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata juga dilaksanakan agar masyarakat

dapat menjadi bagian dari rantai nilai pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini meliputi pelatihan kewirausahaan, pelatihan produksi produk kreatif, hingga manajemen destinasi wisata. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah daerah mengharapkan terciptanya ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, program ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan wisata dan produk kreatif lokal yang siap bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dengan SDM yang unggul, sektor ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kontribusi terhadap PDRB daerah.

3.3.2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini fokus pada pengembangan dan penataan destinasi wisata unggulan di Kabupaten/Kota. Kegiatannya mencakup pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana-prasarana wisata seperti akses jalan, fasilitas umum, dan atraksi wisata, yang disesuaikan dengan tahapan pengembangan destinasi (rintisan, berkembang, pemantapan, atau revitalisasi).

Selain itu, dilakukan pula kegiatan penetapan destinasi wisata unggulan yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai magnet kunjungan wisatawan. Penetapan ini dilakukan melalui kajian dan verifikasi lapangan agar destinasi yang ditetapkan benar-benar layak dari sisi daya tarik, kesiapan infrastruktur, dan potensi pemberdayaan ekonomi lokal.

Program ini juga mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan destinasi, guna memastikan kualitas pengelolaan berjalan sesuai dengan standar. Dengan pendekatan ini, diharapkan destinasi wisata di daerah mampu memberikan pengalaman yang berkualitas, aman, dan menarik bagi wisatawan.

3.3.3 Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata berfokus pada promosi destinasi dan daya tarik wisata daerah ke pasar dalam dan luar negeri. Kegiatan yang dilakukan meliputi penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan digital; serta penyediaan data dan informasi wisata yang terintegrasi dan mudah diakses

Disbudpar juga melaksanakan fasilitasi partisipasi daerah dalam event promosi atau pameran pariwisata tingkat nasional dan internasional. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan visibilitas destinasi wisata daerah dan menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, dilakukan pula kemitraan dan kerja sama dengan pelaku industri pariwisata dan media untuk memperluas jaringan promosi.

Dalam menunjang efektivitas promosi, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemasaran agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas dari strategi yang diterapkan. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar perbaikan promosi pariwisata ke depan.

3.3.4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif atas karya cipta dan inovasinya. Kegiatan utama meliputi fasilitasi pendaftaran HKI, penyusunan dokumen strategis pengembangan ekonomi kreatif, serta pemanfaatan HKI dalam peningkatan nilai produk

Selain perlindungan hukum, program ini juga memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran berbasis HKI, pendampingan inkubasi usaha kreatif, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui penyediaan infrastruktur seperti ruang kreasi atau co-working space. Kegiatan tersebut bertujuan agar pelaku ekonomi kreatif tidak hanya terlindungi tetapi juga naik kelas dalam skala bisnisnya.

Output dari program ini adalah meningkatnya jumlah produk ekonomi kreatif yang didaftarkan HKI, berkembangnya sistem pemasaran berbasis kekayaan intelektual, serta terbentuknya komunitas kreatif yang mampu berkolaborasi dalam menciptakan inovasi yang bernilai ekonomi tinggi.

3.3.5 Rumusan Program dan Kegiatan.

Perencanaan pembangunan tahunan perangkat daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung menyusun rancangan program dan kegiatan berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis sektoral, kebutuhan masyarakat, serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan program dan kegiatan juga mempertimbangkan potensi daerah serta arah kebijakan nasional dan provinsi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu, penyusunan rencana program dan kegiatan perubahan tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada hasil forum konsultasi publik, Musrenbang Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah. Proses ini dimaksudkan agar perencanaan yang disusun benar-benar partisipatif dan mampu merespons secara tepat kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, promosi destinasi, serta peningkatan kualitas layanan kepariwisataan yang berdaya saing.

Harmonisasi antara rencana kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 menjadi landasan penting agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan sinergis lintas sektor. Setiap usulan kegiatan telah melalui proses verifikasi dan klarifikasi agar sesuai dengan

tema dan prioritas pembangunan daerah pada tahun berjalan. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dirumuskan tidak hanya menjawab kebutuhan sektoral, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berangkat dari hal tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung juga menempatkan aspek kolaborasi dengan perangkat daerah lain, pelaku usaha, komunitas kreatif, dan masyarakat sebagai faktor penentu keberhasilan. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu memperkuat integrasi antarprogram serta memperluas manfaat pembangunan, khususnya dalam meningkatkan daya tarik pariwisata, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, harmonisasi rencana kerja ini juga diarahkan untuk memperkuat identitas Kabupaten Bandung sebagai destinasi pariwisata unggulan berbasis kearifan lokal yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Dengan memastikan setiap kegiatan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan potensi destinasi, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, maka implementasi program diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya daerah.

Rumusan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.3
RUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERUBAHAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DISPAREKRAF TAHUN 2025
KABUPATEN BANDUNG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.660.751.650,00	4.250.358.236,00	0,00						2.840.851.650,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				28.989.187.255,00	29.738.084.355,04	23.196.002.453,00						24.583.941.306,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				28.989.187.255,00	29.738.084.355,04	23.196.002.453,00						24.583.941.306,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	-	1. 66 Poin 2. 60 poin	19.789.431.455,00	20.970.232.255,04	16.120.017.622,00						17.103.113.106,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	388.000.000,00	373.834.900,00	373.834.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		343.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	226.116.000,00	120.576.700,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		186.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		6.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		6.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		5.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		5.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		10.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	50.243.900,00	50.243.900,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		50.000.000,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah												
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		2.500.000,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah												
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	3 Data	72.500.000,00	68.025.000,00	300.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		72.500.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	11.762.791.715,00	12.404.169.726,00	12.404.169.726,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		10.213.120.766,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	11.758.791.715,00	12.400.169.726,00	8.793.028.901,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		10.209.120.766,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		1.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		3.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000,00	28.905.000,00	28.905.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		40.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		2.000.000,00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD												
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	26.905.000,00	9.905.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		38.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.202.000,00	41.350.000,00	41.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		20.202.000,00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah												
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	20.202.000,00	41.350.000,00	11.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		20.202.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	274.000.000,00	264.890.000,00	264.890.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		249.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	36 Paket	40.000.000,00	36.090.000,00	35.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		40.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70 Orang	234.000.000,00	228.800.000,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		209.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	784.072.400,00	784.607.000,00	784.607.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		608.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	171.809.517,96	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		50.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	225.000.000,00	184.470.000,00	119.470.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		180.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.000.000,00	94.839.000,00	94.839.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		17.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		20.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	91.000.000,00	67.585.000,00	67.585.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		91.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		10.000.000,00
Penyediaan Bahan/Material												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	54.250.000,00	44.931.200,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		20.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu												
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	70.072.400,00	66.080.000,00	66.080.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		50.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	177.383.000,00	65.182.513,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		170.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	185.000.000,00	352.903.614,00	352.903.614,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		355.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	85.129.000,00	4.282.500,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		260.000.000,00
Pengadaan Mebel												
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8 Unit	20.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		20.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18 Unit	25.000.000,00	111.514.614,00	138.489.814,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		25.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	119.760.000,00	119.760.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		50.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	6.027.790.340,00	5.977.939.000,00	5.977.939.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		4.907.790.340,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	609.278.400,00	615.919.600,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		650.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.277.790.340,00	5.368.660.600,00	4.935.886.256,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		4.257.790.340,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	235.000.000,00	661.537.015,04	661.537.015,04			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		295.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		45.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	90.000.000,00	89.680.000,00	89.680.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		160.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	82 Unit	50.000.000,00	114.500.000,00	114.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		40.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	101 Unit	50.000.000,00	457.357.015,04	258.945.720,04	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		50.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	72.575.000,00	80.096.000,00	80.096.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		72.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	72.575.000,00	80.096.000,00	80.096.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		72.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan Jumlah Desa Wisata yang berkembang	1 DESA	1 DESA	4.244.316.200,00	3.652.603.300,00	2.615.026.101,00						4.115.316.200,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	1 %	1 %	3.787.351.000,00	3.221.138.500,00	3.221.138.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		3.508.351.000,00
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	2.355.380.000,00	1.639.217.900,00	1.437.557.901,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		2.671.380.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	30 Laporan	30 Laporan	1.222.284.000,00	1.372.233.600,00	1.002.278.300,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		527.284.000,00
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Lokasi	4 Lokasi	209.687.000,00	209.687.000,00	103.680.400,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegras		309.687.000,00
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang terlayani	100 %	100 %	456.965.200,00	431.464.800,00	431.464.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Pengembangan Destinasi kepariwisataan Kabupaten Bandung		606.965.200,00
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	8 Usaha	8 Usaha	156.965.200,00	131.464.800,00	71.509.500,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		306.965.200,00
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota												
	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	15 Usaha	15 Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		300.000.000,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-	2.550.439.600,00	3.264.753.700,00	2.260.559.200,00						1.675.439.600,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.550.439.600,00	3.264.753.700,00	3.264.753.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		1.675.439.600,00
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri												
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	127.494.700,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		250.000.000,00
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	475.000.000,00	570.837.100,00	466.415.900,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		200.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata												
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	148.720.000,00	72.570.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		200.000.000,00
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.400.939.600,00	1.895.196.600,00	1.534.078.600,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		800.939.600,00
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri												
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	2 Promosi	224.500.000,00	400.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		224.500.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI	2 %	2 %	580.000.000,00	502.770.000,00	660.099.400,00						230.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunitas Ekraf	1 Komunitas	1 Komunitas	580.000.000,00	502.770.000,00	502.770.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		230.000.000,00
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan												
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	196.750.000,00	151.750.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		50.000.000,00
Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi	1 Promosi	130.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		80.000.000,00
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual												
	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	10 Produk	10 Produk	250.000.000,00	236.020.000,00	438.349.400,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		100.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	5 %	5 %	1.825.000.000,00	1.347.725.100,00	1.540.300.130,00						1.460.072.400,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan	500 Peserta	500 Peserta	1.425.000.000,00	1.089.180.500,00	1.089.180.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		846.072.400,00
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif												
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	221.840.000,00	193.076.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		200.000.000,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		131.072.400,00
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata												
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	800 Orang	800 Orang	975.000.000,00	617.340.500,00	722.360.130,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		265.000.000,00
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	377.309.400,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		250.000.000,00
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf	1 Kegiatan	1 Kegiatan	400.000.000,00	258.544.600,00	258.544.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		614.000.000,00
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		110.000.000,00
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif												
	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	200 Orang	200 Orang	400.000.000,00	258.544.600,00	247.554.600,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi		504.000.000,00
				34.649.938.905,00	33.988.442.591,04	23.196.002.453,00						27.424.792.956,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan penyesuaian arah program dan kegiatan serta alokasi pendanaannya, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada Renstra Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Bandung dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Rancangan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025 -2029 dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025. Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

TABEL 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		23,030,048,953.00
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15,954,064,122.00
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	
3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		183,417,100.00
Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		120,576,700.00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
3.26.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3,400,000.00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
3.26.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3,400,000.00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
3.26.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		5,000,000.00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
3.26.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		5,000,000.00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10,150,000.00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		33,090,400.00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3.26.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		2,500,000.00
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
3.26.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		300,000.00
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
3.26.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
3.26.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		0
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	
3.26.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu		0
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
3.26.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		0
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8,797,028,901.00
Presentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8,793,028,901.00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
3.26.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
3.26.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
3.26.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
3.26.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1,000,000.00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
3.26.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		3,000,000.00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
3.26.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		23,960,000.00
Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
3.26.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2,000,000.00
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
3.26.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
3.26.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
3.26.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		21,960,000.00
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
3.26.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
3.26.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
3.26.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
3.26.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		11,556,000.00
Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
3.26.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		0
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	
3.26.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		0
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	
3.26.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		0
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
3.26.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		0
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	
3.26.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah		0
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	
3.26.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah		0
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	
3.26.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		11,556,000.00
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		35,000,000.00
Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	
3.26.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
3.26.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		35,000,000.00
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
3.26.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
3.26.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	
3.26.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
3.26.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun		0
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	
3.26.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		0
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
3.26.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN		0
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	
3.26.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
3.26.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
3.26.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		710,734,730.96
Presentase Dokumen pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		171,809,517.96
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		149,470,000.00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
3.26.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		94,839,000.00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		30,000,000.00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		67,585,000.00
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
3.26.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		10,000,000.00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
3.26.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material		55,768,700.00
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
3.26.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu		66,080,000.00
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		65,182,513.00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
3.26.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
3.26.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		246,139,814.00
Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
3.26.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
3.26.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
3.26.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar		0
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	
3.26.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		0
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	
3.26.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel		36,500,000.00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		138,489,814.00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
3.26.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya		0
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	
3.26.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud		0
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	
3.26.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
3.26.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		71,150,000.00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
3.26.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5,371,590,856.00
Presentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		602,959,600.00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
3.26.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4,768,631,256.00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		494,540,720.04
Presentase BMD dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		89,680,000.00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
3.26.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		0
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	
3.26.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		0
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
3.26.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel		0
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
3.26.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		132,955,000.00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
3.26.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		0
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	
3.26.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		0
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	
3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
3.26.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		271,905,720.04
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
3.26.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
3.26.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		0
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	
3.26.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD		0
3.26.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		80,096,000.00
Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
3.26.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		80,096,000.00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
3.26.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	
3.26.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
3.26.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
3.26.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		0
3.26.01.2.13 - Penataan Organisasi		0
3.26.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		0
3.26.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		0
3.26.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD		0
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		2,536,806,101.00
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		0
presentase kawasan strategis pariwisata yang memenuhi standar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	
3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		0
Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	
3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		0
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		0
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		0
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	
3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		0
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		0
Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		0
Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		0
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		0
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		0
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	
3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		0
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		2,468,696,601.00
Persentase destinasi yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	
3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0
Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1,387,557,901.00
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		977,458,300.00
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		103,680,400.00
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota		0
Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	
3.26.02.2.03.0009 - Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya		0
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	
3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		68,109,500.00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki jaminan usaha	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	
	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	
	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	
	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	
	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	
	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	
	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	
	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	
3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	
3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota		68,109,500.00
3.26.02.2.04.0008 - Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota		0
Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	
3.26.02.2.04.0009 - Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota		0
Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	
3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	
3.26.02.2.04.0011 - Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota		0
Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	
3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota		0
Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
3.26.02.2.04.0013 - Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)		0
Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menegah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	
3.26.02.2.04.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko		0
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	
3.26.02.2.04.0016 - Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah		0
Terlaksananya Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		2,300,655,200.00
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Produk Pariwisata yang dipasarkan	
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		2,300,655,200.00
jumlah produk pariwisata yang di pasarkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		127,494,700.00
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		516,415,900.00
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		72,570,000.00
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		1,524,174,600.00
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		60,000,000.00
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		699,923,400.00
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	
3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota		0
Jumlah zona kreatif/ruang kreatif yang dibangun, direvitalisasi, atau difungsikan secara aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	
3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif		0
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ		699,923,400.00
Persentasi peningkatan Usaha ekonomi kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	
	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	
	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	
	Jumlah Insentif yang Diberikan	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	
	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	
	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	
	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	
	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	
3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan		0
Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	
3.26.04.2.02.0003 - Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan		150,030,000.00
Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	
3.26.04.2.02.0004 - Penyediaan Infrastruktur		0
Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	
3.26.04.2.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	
3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		0
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
3.26.04.2.02.0011 - Fasilitasi pemberian insentif		0
Terlaksananya fasilitasi pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	
3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah		0
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	
3.26.04.2.02.0015 - Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual		0
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	
3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah		0
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
3.26.04.2.02.0017 - Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif		111,544,000.00
Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	
3.26.04.2.02.0018 - Penyusunan Skema Insentif Daerah		0
Terlaksananya skema insentif ekonomi kreatif daerah	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	
3.26.04.2.02.0019 - Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah		0
Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	
3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		0
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual		438,349,400.00
Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		1,538,600,130.00
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwsata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		1,291,045,530.00
Presentase peserta yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengembangan kompetensi, sertifikasi, serta pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan industri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		193,076,000.00
Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		0
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		0
Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	
3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		722,360,130.00
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	
3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		375,609,400.00
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		247,554,600.00
Presentase pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan Digitalisasi dan Penguatan Sistem Informasi	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	
	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	
	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	
	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	
	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	
	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		0
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
3.26.05.2.02.0002 - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha		0
Terlaksanya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	
3.26.05.2.02.0004 - Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif		0
Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	
3.26.05.2.02.0005 - Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif		0
Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	
3.26.05.2.02.0006 - Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif		0
Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	
3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif		247,554,600.00
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan industri kreatif sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk respons terhadap dinamika kondisi aktual, hasil evaluasi kinerja semester II, serta kebutuhan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan analisis terhadap potensi wilayah, perkembangan isu strategis sektoral, dan tantangan pembangunan yang tengah berlangsung, seperti proses pemulihan ekonomi pascapandemi, peningkatan daya saing destinasi wisata, serta penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif lokal. Penyusunan Renja Perubahan ini juga memperhatikan integrasi program lintas sektor dan sinergi antar tingkatan pemerintahan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung diarahkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan disusun secara terukur, berbasis data, serta mengutamakan pendekatan berbasis hasil (result-based planning).

Pelaksanaan program juga mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung lingkungan serta pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kolaborasi dengan pelaku usaha, komunitas kreatif, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi pendekatan utama dalam menciptakan ekosistem yang sehat dan kompetitif.

Penguatan kelembagaan, penyesuaian struktur organisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga teknis dan pengelola destinasi wisata serta ekonomi kreatif, menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan yang optimal. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan menjadi instrumen penting dalam memperluas jangkauan promosi, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat proses transformasi sektor ini.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin konsistensi implementasi Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung menetapkan sejumlah langkah tindak lanjut strategis yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Langkah-langkah tindak lanjut tersebut mencakup:

1. Penguatan koordinasi internal dan eksternal, sebagai upaya menyinergikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah terkait, sektor swasta, komunitas, dan lembaga non-pemerintah.
2. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan, guna mengukur capaian output dan outcome secara objektif, terukur, dan tepat waktu.
3. Pengembangan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dalam rangka memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program serta mencegah potensi penyimpangan atau keterlambatan dalam pelaksanaan.
4. Pemetaan potensi dan peluang pendanaan alternatif, baik melalui dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun melalui kemitraan strategis dengan pihak swasta dan non-pemerintah, untuk memperluas sumber pembiayaan dan memperkuat keberlanjutan program.

5. Penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, agar pelaksanaan program tetap adaptif, relevan, dan responsif terhadap perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, serta arah kebijakan sektoral yang terus berkembang.

Dengan pelaksanaan yang berlandaskan prinsip tata kelola yang baik serta kolaborasi multipihak yang sinergis, diharapkan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Bandung mampu memberikan kontribusi nyata terhadap:

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing;
- Peningkatan nilai tambah dan daya jual sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BANDUNG

Ttd

H. WAWAN AHMAD RIDWAN, S.STP, M.Si

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Tahun 2026 ini dapat disusun sebagai acuan perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung arah pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung.

Dokumen Renja Perubahan tahun 2025 ini memiliki nilai penting dan strategis, karena disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Sebagai perangkat daerah yang baru terbentuk melalui pemisahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, penyusunan Renja Perubahan ini menjadi bagian dari proses konsolidasi kelembagaan, sekaligus wujud komitmen dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Renja Perubahan ini memuat prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025 setelah perubahan, disertai target kinerja, indikator capaian, serta kebutuhan pendanaan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Penyusunan Renja Perubahan ini mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi referensi operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara kolaboratif, efektif, dan adaptif. Pelibatan masyarakat, komunitas kreatif, pelaku usaha, akademisi, dan unsur lainnya tetap menjadi bagian tak terpisahkan dalam mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai destinasi yang berdaya saing, berkarakter, dan menyejahterakan.

Kami juga menyadari bahwa dokumen ini belum sepenuhnya sempurna dan masih membutuhkan penyempurnaan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami membuka ruang partisipasi seluas-luasnya untuk menerima masukan, saran, dan kritik konstruktif demi optimalisasi pelaksanaan di lapangan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Perubahan Tahun 2025 ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menyongsong kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung.

Soreang, Juli 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KABUPATEN BANDUNG

H. WAWAN AHMAD RIDWAN, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 19750601 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	9
	1.1. LATAR BELAKANG	9
	1.2. LANDASAN HUKUM	13
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	16
	1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	17
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	19
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025	19
	2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISPAREKRAF	31
	2.3. ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	32
	2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	36
	2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	52
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	57
	3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	57
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISPAREKRAF	65
	3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	102
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	126
	4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	126
BAB V	PENUTUP	151
	5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA	151
	5.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN	151
	5.3. RENCANA TINDAK LANJUT	152

DAFTAR TABEL

Nomor				Halaman
1.	Tabel 2.1	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20
2.	Tabel 2.2	:	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Kinerja	30
3.	Tabel 2.3	:	Permasalahan Urusan Kepariwisataan	33
4.	Tabel 2.4	:	Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	34
5.	Tabel 2.5	:	Tantangan dan Peluang Kinerja	34
6.	Tabel 2.6	:	Review Renja Terhadap Analisis Kebutuhan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	37
7.	Tabel 2.7	:	Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2026 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	54
8.	Tabel 3.1	:	Tujuan dan Sasaran Utama DISPAREKRAF	66
9.	Tabel 3.2	:	Tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan Rencana Kerja Tahun 2026 DISPAREKRAF	68
10.	Tabel 3.3	:	Rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Disbudpar Tahun 2026	107
11.	Tabel 4.1	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	127

DAFTAR GAMBAR

Nomor			Halaman
1. Gambar 1.1	:	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13
2. Gambar 2.1	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung	33
3. Gambar 2.2	:	Alur Pelaksanaan Musrenbang	57